

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

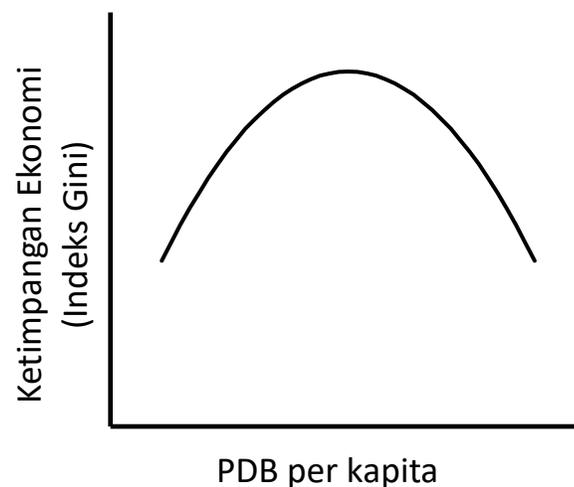
Ketimpangan Pendapatan menurut Smith & Todaro (2012) adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Sementara ketimpangan pendapatan menurut Baldwin (dalam Richardson, 1991) adalah adanya perbedaan kemakmuran dalam perekonomian antara yang kaya dengan yang miskin. Glaeser menyatakan (dalam Hajiji, 2010) bahwa ketimpangan pendapatan dapat ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal di suatu negara.

Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris (2014) dalam bukunya yang berjudul *“Economic Growth and Social Equity in Developing Countries”* menjelaskan bahwa terdapat delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan perkapita.
2. Terjadinya inflasi, yaitu keadaan dimana bertambahnya pendapatan uang secara proposional, yang tidak diikuti dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Pembangunan antar daerah yang tidak merata.
4. Banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga menyebabkan presentase pendapatan dari modal lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari tenaga kerja, sehingga pengangguran menjadi bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan, hal ini terjadi untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Akibat adanya tidak elastisnya permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara-negara yang sedang berkembang, menyebabkan nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara yang sedang berkembang memburuk di dalam perdagangan dengan negara-negara maju.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Kuznets (1955) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini distribusi pendapatan akan

memburuk, namun, di tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan ketimpangan akan terkikis, sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara. Singkatnya, Analisis Kuznets ini menjelaskan bahwa ketimpangan baru akan menurun setelah kemakmuran tercapai. Dan berdasarkan analisis ini juga kemudian tercipta kurva “U-Terbalik” Kuznets.



Sumber: Ekonomi Pembangunan (Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, 2012)

Gambar 2.1 Kurva Kuznetz

Gambar 2.1 diatas menjelaskan Kurva Kuznet yang merupakan hubungan antara pendapatan per-kapita dan ketimpangan pendapatan. Ada beberapa penelitian lain yang mengkonfirmasi mengenai Kurva “U-Terbalik” milik Kuznets ini, salah satunya adalah sering dikaitkannya dengan hakikat perubahan struktural (Smith & Todaro, 2012). Seperti yang dikatakan oleh Sherman Robinson (1976) dalam

jurnalnya, bahwa perubahan pembangunan akan terjadi di suatu negara, yang awalnya berfokus pada sektor pertanian di daerah pedesaan kemudian menjadi sektor industri di daerah perkotaan. Dalam model ini, sektor pertanian atau pedesaan mulanya mendominasi perekonomian. Pembangunan ekonomi kemudian mendorong terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Adanya efek domino pada masa awal pembangunan disebabkan oleh tenaga kerja yang berada di sektor pertanian. Hal ini membuat ketimpangan pendapatan semakin membesar antara tenaga kerja yang bekerja di sektor industri atau perkotaan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian atau pedesaan. Penelitian lainnya yaitu (Papanek & Kyn, 1986) menyatakan bahwa walaupun Kurva Kuznets sangat signifikan, tetapi kurva tersebut hanya menjelaskan sedikit tentang jenis kesenjangan di berbagai negara atau sepanjang waktu.

Dumairy (1997) mengatakan untuk menilai tingkat keparahan dari ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui beberapa tolak ukur. Dua diantaranya yang paling umum dan biasa digunakan dalam mengukur persoalan ketimpangan pendapatan adalah:

- 1) Kurva Lorenz
- 2) Indeks Gini

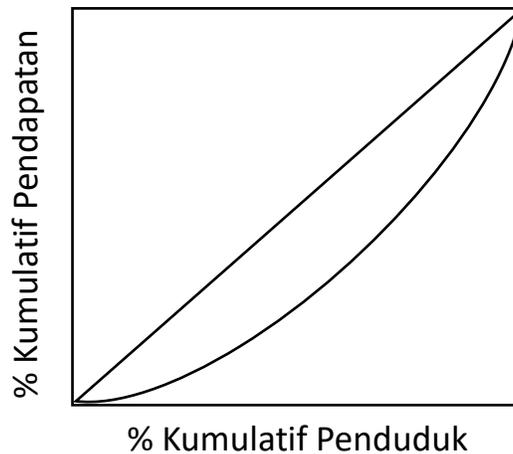
2.1.1.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diciptakan oleh Conrad Lorenz, seorang ahli Statistika dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva ini menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk dan distribusi pendapatan (Sastra, 2017). Terdapat dua sumbu yang menjadi komponen kurva ini, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk, yang digambarkan tidak dalam angka tetapi dalam bentuk persentase kumulatif. Sumbu vertikal menunjukkan total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk, yang dijelaskan tidak dalam angka tetapi juga dalam bentuk kumulatif sampai 100 persen. Dengan demikian, kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.

Lalu terdapat garis diagonal yang kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal tersebut menunjukkan persentase pendapatan yang diterima. Garis diagonal tersebut biasa disebut sebagai garis pemerataan sempurna karena garis tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan pemerataan yang sempurna (*perfect equality*).

Jika garis diagonal dalam Kurva Lorenz ini semakin jauh maka semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataan atau tingkat ketimpangan. Keadaan yang paling ekstrim ditunjukkan apabila terjadi perhimpitan Kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertical sebelah kanan. Hal ini disebabkan karena

fenomena ketidakmeataan yang sempurna, misalnya adalah keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang.



Sumber: Kesenjangan Ekonomi (Eka Sastra, 2017)

Gambar 2.2 Kurva Lorenz

2.1.1.2 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan hasil kuantifikasi dari Konsep Kurva Lorenz. Indeks ini diciptakan oleh Corrado Gini (1912) dalam karyanya yang berjudul *Variabilità e mutabilità*. Indeks Gini merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang biasa digunakan untuk melihat seberapa besar penyimpangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan di kalangan rumah tangga.

Perbedaannya dengan Kurva Lorenz adalah, Kurva Lorenz menggambarkan persentase kumulatif total pendapatan yang diterima terhadap jumlah kumulatif

penerima, sedangkan Indeks Gini akan mengukur luas daerah antara Kurva Lorenz dan garis hipotesis. Secara matematik, Indeks Gini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Dumairy, 1997):

$$0 < G < 1$$

$$G = 1 - \sum (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

$$G = 1 - \sum f_i(Y_i - Y_{i+1})$$

Keterangan:

G = Gini Rasio

f_i = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas i

X_i = Proporsi Jumlah Kumulatif rumah tangga dalam kelas i

Y_i = Proporsi Jumlah Kumulatif Pendapatan dalam kelas i

Indeks Gini nilainya berkisar 0 sampai 1. Indeks Gini yang nilainya mendekati angka 0, merupakan koefisien yang tergolong rendah dan menunjukkan adanya kesetaraan distribusi pendapatan, sedangkan Indeks Gini yang nilainya mendekati angka 1 merupakan koefisien yang tergolong tinggi dan menunjukkan ketidakmerataan distribusi.

Indeks Gini membagi tingkat ketimpangan pendapatan menjadi lima macam (Sastra, 2017), yaitu:

1. Ketimpangan sangat tinggi (Rasio Gini ≥ 0.8)
2. Ketimpangan tinggi (0,6-0,79)
3. Ketimpangan sedang (0,4-0,59)
4. Ketimpangan rendah (0,2-0,39)
5. Ketimpangan sangat rendah ($<0,2$).

Indeks Gini juga dapat menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Selain itu, Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor dan negara. Indeks Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga mampu menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut (Sastra, 2017).

2.1.2 Teori *New Institutional Economy*

Teori *New Institutional Economy* atau teori NIE adalah teori yang menjelaskan adanya ketidaksempurnaan informasi dan adanya biaya transaksi. Dimana diasumsikan para pelaku ekonomi tidak dapat secara bebas keluar masuk dalam pasar, dikarenakan tidak samanya informasi yang dimiliki oleh setiap pelaku. Informasi yang tidak sempurna tersebut menimbulkan adanya resiko berupa biaya transaksi (*transaction cost*). Semakin tidak sempurnanya informasi yang ada, semakin besar pula biaya transaksi yang harus dikeluarkan (Furubotn and Richter, 1993 dan Harris, et al.,1995).

Menurut (Menard, 2005) karena NIE mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga atau institusi, NIE memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada ekonomi neoklasik, yang sebagian besar terkait dengan harga dan hasil. Tetapi tidak seperti teori ekonomi institusional yang lama, NIE tidak meninggalkan teori ekonomi neoklasik.

Terdapat salah satu alasan yang mendasari pentingnya peran *NIE*, yaitu dikarenakan NIE merupakan teori yang pendekatannya menyesuaikan pada perubahan institusi yang berkaitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Furubotn and Richter, 1993 dan Harris, et al.,1995). NIE berfokus pada bagaimana lembaga-lembaga ini muncul, beroperasi dan berkembang, cara mereka membentuk berbagai peraturan dan bagaimana peraturan ini bertindak. Institusi sendiri adalah aturan yang ada dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang juga berupa norma dan batasan yang dirancang oleh manusia dalam mengendalikan lingkungan dan masyarakat itu sendiri (Menard, 2005).

Williamson (2000) menjelaskan empat level kelembagaan di dalam teori NIE, yaitu:

- Level I

Teori sosial (*social theory*) yang merupakan aturan informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti tradisi, agama, norma, adat, dan konvensi keterkandungan atau *mindset (embeddedness)*.

- Level II

Lingkungan kelembagaan (*institutional environment*), yang menekankan pada ekonomi kepemilikan (*economics of property rights*) yang terdiri dari aturan main (hukum), politik dan birokrasi yang meliputi fungsi eksekutif, legislatif, hukum, maupun fungsi birokrasi pemerintahan. Definisi hak milik (*property rights*) dan hukum kontrak (*contract law*) merupakan gambaran penting

- Level III

Struktur tata kelola yang menekankan kontrak dan biaya transaksi (*transaction cost economics*).

- Level IV

Efisiensi sumber daya dan struktur insentif yang merupakan kerangka kerja neoklasik. Penyesuaian harga dan output bersifat lebih atau kurang.

2.1.3 Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, secara luasnya memiliki arti yaitu, cara dalam melaksanakan kebijakan di dalam sebuah negara yang ditentukan oleh Lembaga yang ada (Kaufmann et al., 2000). Tata kelola sendiri berkaitan dengan metode, mekanisme, atau proses di dalam mengelola sebuah negara dan dalam memenuhi kepentingan masyarakat (Weiss, 2005).

Good Governance, menurut OECD dan *World Bank* (Sedarmayanti, 2009:273) adalah sebagai penyelenggara dalam proses pembangunan yang bertanggung jawab, yang sejalan dengan demokrasi dan keefisienan, juga penghindaran dalam kesalahan alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi di dalam politik dan administrasi, dan dalam menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum yang baik dan benar.

United Nation Development Program (UNDP, 2004) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah dimana penggunaan wewenang sebaik-baiknya dalam ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara yang juga merupakan instrumen kebijakan negara, dalam mendorong terciptanya kesejahteraan dan kohesivitas sosial di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu sebagai berikut (UNDP, 2004) :

1) Partisipasi

Hak suara yang sama yang dimiliki oleh seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan, sesuai dengan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi.

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Aturan hukum dan perundangan-undangan yang harus dipatuhi secara utuh.

3) Transparansi

Transparansi berupa kebebasan informasi berbagai dan kemudahan dalam mengakses informasi bagi mereka yang membutuhkannya dan disediakan secara memadai.

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus memiliki keselarasan antara program dan pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau institusi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda tersebut.

6) Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baiknya terhadap kepada seluruh warganya dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidup.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Pemanfaatan yang sebaik- baiknya dan pengarahannya terhadap setiap proses kegiatan dan kelembagaan dalam upaya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan.

8) Akuntabilitas

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public yang dimiliki oleh Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Perspektif yang luas dan dalam jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah dan warga negara di dalamnya mengenai penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

World Bank (2005) juga menyimpulkan enam indikator dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Suara dan akuntabilitas dalam menilai hak-hak politik, sipil, dan manusia.
2. mengukur tingkat kemungkinan adanya ketidakstabilan politik dan kekerasan.
3. Efektifitas pemerintah
4. Mengukur sejauh mana dampak dari kebijakan pasar
5. Mengukur kualitas peraturan hukum
6. Kontrol korupsi.

2.1.4 Korupsi

Dalam Bahasa latin kata korupsi diambil dari kata *corruptus*, kemudian dalam Bahasa Belanda disebut *corruptive*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*. Secara harfiah korupsi memiliki arti yaitu, hal yang menunjukkan perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur dan disangkutpautkan dengan bidang keuangan. Sedangkan menurut *World Bank*, korupsi memiliki arti “*An Abuse of Public Power For Private Gains*”, yang bila diartikan, yaitu, suatu penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Effendy dalam Pramono, 2016)

Korupsi juga memiliki arti, yaitu, suatu tindakan yang menyimpang dari tugas utama sebuah jabatan negara, dikarenakan keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (baik perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri) dan melanggar aturan pelaksanaan, termasuk dalam hal etika dan moral menurut pandangan masyarakat (Klitgaard, 2005). Secara umum, istilah korupsi ialah berbagai tindakan yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok, serta untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan hukum. Seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu, arti korupsi adalah penyalahgunaan kedudukan publik atau kekuasaan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi, orang lain, atau korporasi (Effendy dalam Pramono, 2016)

Sheldon Steinberg dan David T. Austern (1999) mengatakan bahwa korupsi adalah bagian dari tindakan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan dan orang lain dengan alasan tertentu yang berbeda satu sama lain, tetapi memiliki suatu tujuan yang

sama, yang kemudian dilaksanakan dengan perbuatan tidak etis yang dapat merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik. Padahal, terdapat tuntutan moral berupa kepercayaan dan kejujuran bagi setiap pegawai pemerintahan dan pejabat-pejabat yang dipilih dan diangkat oleh masyarakat. Sehingga, pegawai pemerintahan harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan etika dan peraturan yang telah ditetapkan.

Wang An Shih seorang pemberharu dari Tiongkok mengatakan bahwa korupsi terjadi dikarenakan dua sumber, yaitu *bad laws* dan *bad man* (Alatas & Usman, 1982). Hal tersebut mengartikan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi sangat tergantung dari sifat dan para pelaksananya, yang dalam hal ini adalah para aparaturnya penegak hukum dan masyarakat di dalamnya.

2.1.4.1 Jenis-jenis Korupsi

Secara yuridis, arti dan jenis korupsi telah dirumuskan dalam UU Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999. Korupsi dalam arti yuridis, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau individu. Rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3)
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (penyuap) maupun pasif (penerima suap) serta gratifikasi (pasal 5 ayat 1 ayat 2, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c, dan d, serta pasal 12B ayat 1 dan ayat 2)
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, pasal 10 huruf a)
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, exortion*)
5. Kelompok delik pemalsuan (Pasal 9)
6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan (Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, pasal 12 huruf g dan huruf i)

Syed Hussein Alatas, ahli sosiologi Malaysia, membagi korupsi menjadi dalam enam bentuk, yaitu:

1. *Transactive corruption*

Korupsi ini dilakukan oleh dua pihak dalam bentuk suap, di mana kedua pihak ini, yang memberi dan menerima suap saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Korupsi dalam bentuk ini adalah yang paling umum terjadi.

2. *Extortive Corruption*

Korupsi ini terjadi dalam bentuk pungutan paksa yang dilakukan pejabat kepada pihak luar sebagai tanda balas jasa. Pihak luar tersebut harus memenuhinya, karena jika tidak dipenuhi maka yang bersangkutan akan rugi sendiri.

3. *Investive Corruption*

Pemberian yang diberikan kepada pejabat yang bersal dari pihak luar untuk memperoleh kemudahan fasilitas dan keuntungan di masa yang akan datang.

4. *Nepotistic Corruption*

Korupsi ini berbentuk pengangkatan atau pemberian jabatan publik kepada keluarga atau teman.

5. *Autogenic Corruption*

Korupsi ini berbentuk informasi dari dalam yang diberikan oleh pejabat kepada pihak luar dengan imbalan suap.

6. *Supportive Corruption*

Korupsi dalam bentuk ini dilakukan secara berkelompok atau divisi, yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktik korupsi yang sudah ada secara kolektif.

Revrisond Baswir (1993) kemudian mengidentifikasi tujuh pola korupsi yang sering terjadi:

- Konvensional: Korupsi disebabkan oleh sistem inventarisasi yang tidak memadai.
- Pemalsuan dokumen: Pembuatan dokumen asli tetapi palsu atau fiktif, sehingga uang yang harusnya masuk ke kas negara akan masuk ke tangan oknum korupsi.

Penyebabnya antara lain administrasi yang lemah, tidak jelasnya pembagian tugas yang ada dan pengawasan internal yang kurang baik.

- Komisi: muncul karena gabungan antara kewenangan seorang pejabat dan gaji yang rendah.
- Upeti: untuk memperoleh fasilitas, posisi atau jabatan tertentu, tidak jarang seorang bawahan harus menyerahkan upeti kepada atasannya.
- Nepotisme: memberikan fasilitas khusus kepada kerabat dekat, dan melakukan penangkatan jabatan tertentu terhadap kerabat serta penerimaan pegawai baru untuk sanak keluarga. Penempatan orang-orang dekat pada posisi tertentu dapat memudahkan jalan korupsi semakin terbuka.
- Perusahaan rekanan: Informasi tender yang hanya sampai pada kalangan tertentu saja, hingga adanya perusahaan rekanan fiktif yang tidak jarang menghiiasi proses tender pada proyek-proyek pemerintah.
- Pungli atau suap: Hal ini terjadi biasanya dikarenakan oleh keadaan dimana suatu prosedur yang dipersulit atau alur yang panjang.

2.1.4.2 Sebab-sebab Korupsi

Soedjono Dirdjosisworo (1984) menguraikan sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kesadaran dan kepatuhan hukum yang kurang di berbagai bidang kehidupan

2. Mekanisme administrasi pemerintahan yang tidak tertib
3. Adanya pengaruh yang diakibatkan oleh cepatnya peningkatan *volume* pembangunan yang relatif cepat
4. Kurangnya gaji pegawai dan buruh serta meningkatnya masalah dalam bidang kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja.
5. Faktor-faktor sosial budaya yang dilihat dari sudut psikologi di Indonesia yang buruk, salah satunya, adalah adanya status sosial di kalangan masyarakat.

Kemudian terdapat juga sebab lain yang menjadi faktor terjadinya korupsi

Alatas & Usman (1982) antara lain:

1. Kurang atau lemahnya kepemimpinan yang ada di dalam diri seorang pejabat-pejabat tinggi dalam menjinakkan korupsi.
2. Pendidikan keagamaan dan etika yang kurang
3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
4. Kemiskinan
5. Keadaan masyarakat yang membuka celah untuk berkembangnya korupsi

Berikutnya diuraikan sebab terjadinya korupsi menurut Andi Hamzah (1991), yaitu:

- Kurangnya gaji yang didapatkan pekerja dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat
- Budaya Indonesia yang cukup permisif terhadap perbuatan korupsi

- Kurangnya efektifitas dan efisiensi pengawasan, serta kurang baiknya manajemen yang ada
- Adanya modernisasi yang mempengaruhi masyarakat, hal ini dikarenakan modernisasi membawa perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar yang ada pada masyarakat dan juga berpengaruh dalam adanya perubahan sistem politik

2.1.4.3 Dampak Korupsi

Menurut para ahli, salah satunya, Susan Rose-Ackerman menyatakan bahwa korupsi dapat merusak legitimasi politik negara. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidakefisienan dan ketidakadilan. Sedangkan menurut Selo Soemartjan, korupsi dapat menghilangkan kewibawaan negara dan pemerintah.

Disebutkan oleh *Asian Development Bank* (ADB) dalam kebijakan anti korupsinya bahwa tindakan korupsi menimbulkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan pada pembangunan suatu negara secara khusus. Disimpulkan pula bahwa korupsi mengakibatkan ketidakefisienan pemilihan produsen, ketidakadilan dalam pembagian sumber daya yang ada dan terbatas, sehingga pembagian tidak merata, larinya pendapatan simpanan pemerintah ke tangan perorangan atau pribadi, dan yang terakhir menurut ADB adalah korupsi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2.1.4.4 Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut *Corruption Perception Index*, adalah indeks yang diambil dari beberapa institusi terpercaya yang merupakan hasil kombinasi survei dan penilaian terhadap korupsi yang berfungsi untuk mengukur lalu menilai tingkat keparahan korupsi di setiap negara yang kemudian nantinya akan diperingkat berdasarkan korupsi yang terjadi pada sektor publik.

Indeks Persepsi Korupsi dibuat oleh organisasi bernama *Transparency International*. *Transparency International Forum* mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terpercaya dengan fokus penilaian fungsi yang berbeda-beda. Misalnya *World Bank*, lebih terfokus pada akuntabilitas pengawasan kinerja institusi dan pegawai publik, serta akses masyarakat sipil untuk memperoleh informasi atas urusan publik; *International Country Risk Guide* fokus pada praktik korupsi aktual atau potensi korupsi dalam hal patronase yang berlebihan, nepotisme, pekerjaan yang dapat diperjual belikan, pertukaran kepentingan, pendanaan rahasia untuk partai dan hubungan dekat yang mencurigakan antara politisi dan pembisnis; *International Institute for Management Development* fokus pada praktik penyuapan pada sektor publik; dan lain-lain.

Dari seluruh sumber data, *Transparency International* mengumpulkan data survei yang menilai korupsi pada sektor publik, khususnya *petty corruption*, yakni

korupsi yang mengacu pada penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik tingkat rendah dan menengah.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini dilakukan standarisasi yang kemudian dihitung rata-ratanya. Sebuah negara hanya mendapat nilai persepsi korupsi apabila terdapat setidaknya tiga sumber data yang tersedia.

IPK mengacu pada 13 survei yang berbeda dan penilaian dari beberapa lembaga yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

- Bank Pembangunan Afrika
- *Bertelsmann Foundation*
- *Economist Intelligence Unit*
- *Freedom House*
- *Global Insight*
- *International Institute for Management Development*
- Politik dan Ekonomi *Risk* Konsultansi
- *Politic Risk Services*
- *World Economic Forum*
- Bank Dunia

Negara harus dinilai setidaknya oleh tiga sumber. Terdapat tiga belas survei, yang baik didapat dari para petinggi bisnis, opini survei Lembaga, ataupun penilaian kinerja dari sekelompok analis bersertifikasi. IPK tidak menggunakan survei opini

publik semenjak tahun 2002, setelah teori standarisasi diberlakukan. Hal itu dilakukan agar hasil IPK lebih akurat. IPK menjadi alat ukur persepsi korupsi dikarenakan sulitnya mengukur tingkat mutlak korupsi, dengan skala nilai 0-100, dimana skala 100 menunjukkan tingkat korupsi pada suatu negara sangat rendah.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Penelitian Apergis, Dincer, & Payne (2010)

Penelitian ini menyelidiki mengenai hubungan kausalitas antara korupsi dan ketimpangan pendapatan dengan konsep kerangka multivariat menggunakan kumpulan data panel dari 50 negara bagian Amerika Serikat selama periode 1980 hingga 2004.

Variabel korupsi dalam penelitian ini diukur dengan jumlah pejabat pemerintah yang dihukum di negara bagian di Amerika Serikat karena kejahatan yang berkaitan dengan korupsi pada tahun tertentu. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa peringkat korupsi di Amerika Serikat yang cukup tinggi terjadi di negara-negara bagian seperti Mississippi, Louisiana, Illinois, dan New York, sementara negara-negara bagian seperti Vermont, Oregon, dan Utah memiliki peringkat korupsi yang rendah. Model yang dipakai di dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

$$GINI_{it} = \alpha_i + \delta_{it} + \gamma_1 iCOR_{it} + \gamma_2 iUR_{it} + \gamma_3 iY_{it} + \gamma_4 iEDUC_{it} + \gamma_5 iUNION_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Gini = Indeks Gini

α_i dan δ_i = for the possibility of state-specific fixed effects and deterministic trends

COR= Korupsi

UR= Tingkat Pengangguran

Y= GDP Riil perkapita

EDU= Pendidikan

UNION= Unionization Rate (Tingkat Serikat Pekerja)

ε_{it} = Error Term

Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi panel, baik jangka pendek maupun jangka panjang, menunjukkan hubungan positif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan. Sementara variabel pendapatan riil per kapita, pendidikan, dan tingkat serikat pekerja memiliki hasil negatif dan signifikan. Dan untuk variabel tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil kausalitas Granger yang terkait dalam penelitian ini menunjukkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, keduanya memiliki kausalitas dua arah antara korupsi dengan ketidaksetaraan pendapatan.

2.2.2 Penelitian Dincer & Gunalp (2012)

Studi ini menganalisis pengaruh korupsi terhadap ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan adalah data tahunan dari 48 negara bagian Amerika Serikat yang berbatasan dari tahun 1981 hingga 1997. Untuk mengukur korupsi, jurnal ini menggunakan data jumlah pejabat pemerintah yang dihukum di negara bagian Amerika Serikat karena kejahatan yang berkaitan dengan korupsi dalam tahun tertentu.

Pengukuran ketimpangan pendapatan lintas negara bagian dilakukan dengan menggunakan Indeks Gini dan Indeks Atkinson, dengan dasar rata-rata tahun, yaitu selama 17 tahun. Dalam studi ini disebutkan, bahwa Negara Bagian Texas memiliki ketimpangan tertinggi, sedangkan Wisconsin memiliki ketimpangan terendah.

Studi ini menyertakan beberapa variabel kebijakan, yaitu, tarif pajak penghasilan marjinal federal untuk kelompok tertinggi (Pajak Tinggi) dan untuk kelompok paling bawah (Pajak Rendah). Kemudian memasukkan dua variabel makroekonomi, yaitu, *log* pendapatan riil per kapita dan tingkat pengangguran. Selanjutnya, disertakan dua variabel demografi, yaitu, pendidikan dan usia. Data pangsa usia yang diambil adalah data populasi di bawah usia 24 dan di atas 64 tahun. Untuk mengukur pendidikan, data yang diambil adalah data jumlah populasi di tingkat sekolah menengah atau lebih tinggi. Selanjutnya adalah menyertakan variabel tingkat serikat pekerja sebagai variabel kontrol lainnya. Terakhir adalah dengan menyertakan variabel komposisi industri yaitu, Agrikultur (Pertanian) dan manufaktur (Industri).

Model yang dipakai di dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

$$Inequality_{s,t} = \alpha Inequality_{s,t-1} + \beta Corruptions_{s,t} + \gamma' X_{s,t} + \eta_s + u_{s,t}$$

Keterangan:

Inequality = Ketidaksetaraan pendapatan di negara bagian *s* selama periode waktu *t*.

Corruption = Korupsi

X_s = Kumpulan variabel-variabel kontrol yang mempengaruhi ketimpangan (Seperti: Pajak Tinggi, Pajak Rendah, Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengangguran, *Union* (perserikatan), Agrikultur, Manufaktur) selain korupsi dan *lagged inequality*.

η_s = *the state-fixed effects*

tt = periode waktu

u = *Error term*

Hasil yang positif dan signifikan ditemukan dalam analisis antara korupsi dan ketimpangan pendapatan, yang kemudian menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya hasil yang negatif dan signifikan ditemukan dalam estimasi terhadap variabel pendidikan. Jurnal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan ketimpangan pendapatan. Koefisien *Ln Income* memiliki hasil yang negatif, sedangkan *Ln Income2* adalah positif. Dengan kata lain, hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan pada

awalnya menurun dan kemudian meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, dan menunjukkan hubungan berbentuk U antara dua variabel.

Selanjutnya, koefisien dari pajak rendah dan pajak tinggi yang bersifat negatif. Dalam jurnal ini koefisien pajak rendah lebih besar (dalam nilai absolut) daripada koefisien pajak tinggi dikarenakan pajak penghasilan untuk golongan rendah memiliki efek pemerataan yang lebih besar, sebagian karena perubahan dalam tarif pajak dari golongan bawah mempengaruhi mayoritas penduduk, sementara hanya minoritas kecil yang dipengaruhi oleh tarif pajak dari golongan atas. Pada variabel komposisi industri, menunjukkan adanya hubungan positif antara agrikultur dan manufaktur terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Penelitian Gyimah-Brempong (2002)

Dalam Jurnal yang dibuat oleh Gyimah-Brempong dengan judul "*Corruption, Economic Growth, and Income Inequality in Africa*" ini menggunakan data panel dari negara-negara Afrika serta ditujukan untuk menganalisis efek korupsi pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa peningkatan korupsi berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Dampak kombinasi dari pertumbuhan pendapatan yang menurun dan peningkatan ketidaksetaraan di jurnal ini, menunjukkan bahwa korupsi merugikan orang miskin lebih besar daripada orang kaya di negara-negara Afrika.

Penelitian ini berfokus pada negara-negara Afrika karena sejumlah alasan. Pertama, negara-negara Afrika memiliki korupsi yang bersifat sistemik. Restrukturisasi ekonomi yang diikuti oleh lembaga-lembaga yang lemah dapat mengakibatkan hasil yang buruk jika terdapat tingkat korupsi yang tinggi, terutama jika korupsi dilakukan oleh politisi tingkat tinggi dan birokrasi. Kombinasi ini menjadi alasan kedua untuk melakukan penelitian ini. Ketiga, sektor swasta di negara-negara Afrika cenderung relatif kecil dan lemah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Selain standar hidup yang rendah, di Afrika, pendapatan juga terdistribusi dengan sangat tidak merata. Dan juga korupsi yang terjadi di Afrika bersifat sistemik dan melibatkan kepemimpinan politisi tingkat tinggi.

Di Afrika, sistem pajak nasional tidak bersifat regresif. Namun, korupsi memungkinkan orang kaya dan berkuasa di Afrika dapat menghindari kewajiban pajak mereka, sehingga beban pajak jatuh pada orang miskin. Persamaan yang dipakai dalam jurnal ini adalah:

$$Gini = \gamma_0 + \gamma_1 g + \gamma_2 edu + \gamma_3 y + \gamma_4 corrupt + \gamma_5 govcon + \xi$$

Keterangan:

$\xi = Error\ term$

$\gamma = coefficients\ to\ be\ estimated$

Gini = Indeks Gini

g = Tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan riil (gdp_{grow}) dan tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan perkapita riil di suatu negara ($gnpcapgr$)

edu = Pendidikan

y = *GDP Riil Per Kapita*

$corrupt$ = Korupsi

$govcon$ = Konsumsi Pemerintah

Penelitian ini menggunakan indeks persepsi korupsi yang diterbitkan setiap tahun oleh *Transparency International Forum* dan *University of Gottingen* sebagai pengukuran korupsi. Data yang diambil adalah data pengamatan tahunan dengan sampel dari 21 negara Afrika untuk periode 1993–1999.

Hasil estimasi yang ada dalam jurnal ini yaitu, koefisien (y) memiliki hasil yang positif tetapi tidak signifikan, sedangkan gdp_{grow} negatif dan signifikan, koefisien edu memiliki hasil negatif dan sangat signifikan. Konsumsi pemerintah secara positif terkait dengan ketimpangan pendapatan dan signifikan. Jurnal ini menyatakan bahwa peningkatan korupsi yang ada meningkatkan indeks gini (distribusi pendapatan) sekitar 1,54 poin.

2.2.4 Penelitian Gyimah-Brempong & De Gyimah-Brempong (2006)

Penelitian di dalam jurnal ini menggunakan data panel dari 61 negara selama periode 20 tahun untuk menyelidiki perbedaan regional dalam pengaruh korupsi pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Untuk tujuan penelitian ini, kami mengambil empat wilayah di dunia yaitu, Afrika, Asia, Amerika Latin, dan OECD. Empat belas negara berasal dari Afrika, lima belas dari Asia, sebelas dari Amerika Latin dan 21 berasal dari negara-negara OECD.

Penelitian ini memakai Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh *Transparency International Forum* dan *University of Gottingen* dalam mengukur variabel korupsi. Model persamaan yang dipakai untuk mengestimasi dalam penelitian ini adalah:

$$Gini = \gamma_0 + \gamma_1 y + \gamma_2 edu + \gamma_3 y + \gamma_4 corrupt + \gamma_5 govcon + \gamma_j \sum_j dum_j \times corrupt + \xi$$

Keterangan:

j = Afrika, Asia, dan Amerika Latin

ξ = *Error term*

γ = koefisien yang diestimasi

y = Tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan per kapita riil di suatu negara.

Gini: Indeks Gini

Edu: Pendidikan

Govcon: Konsumsi Pemerintah

y_0 = Pendapatan Awal

Variabel dependen dalam jurnal ini adalah ketimpangan pendapatan. Kemudian, penghasilan awal (y_0) diukur sebagai PDB riil per kapita pada awal suatu periode, sementara (y) diukur sebagai pendapatan riil per kapita pada periode berjalan.

Hasil yang ada pada jurnal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan, dibuktikan dengan efek yang kuat secara statistik dan signifikan dari variabel korupsi terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel (y) dan *edu* memiliki hasil yang negatif, sedangkan untuk koefisien *govcon* hasilnya adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat memiliki korelasi yang negatif, sementara konsumsi pemerintah yang tinggi berkorelasi dengan ketimpangan pendapatan.

Istilah interaksi *dummy* pada jurnal ini dimaksudkan untuk negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Koefisien *dummy* untuk ketiga wilayah ini memiliki hasil yang negatif dan secara signifikan berbeda. Besaran absolut dari koefisien *corrupt* menurun sekitar 25% ketika *dummy-dummy* regional ini dimasukkan dalam persamaan gini. Hasilnya menunjukkan dampak korupsi pada ketimpangan pendapatan yang tertinggi terjadi di Amerika Latin, lalu diikuti oleh Afrika, Asia, dan kemudian oleh negara-negara OECD.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu negara belum tentu dapat menjamin adanya distribusi pendapatan yang merata. Faktanya walaupun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tetapi tetap diikuti oleh masalah perekonomian yang cukup besar dan krusial, yaitu, masalah ketimpangan pendapatan. Seperti yang disebutkan oleh Teori Kuznetz, bahwa ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi sebelum akhirnya mencapai titik tertentu yang disebut titik puncak yang kemudian akan menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan (Kuznets, 1955). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur ketimpangan, salah satunya adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Penelitian ini memilih Indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, dikarenakan Indeks Gini merupakan indeks ketidaksetaraan yang paling umum tersedia dan mudah diinterpretasi (Gyimah-Brempong & De Gyimah-Brempong, 2006)

Untuk memperbaiki laju ketimpangan pendapatan di suatu negara, salah satu caranya adalah dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh stabilitas politik yang baik di negara tersebut. Hal ini disesuaikan dengan Teori *New Institutional Economy* yang menyebutkan pendekatannya yang menyesuaikan perubahan institusi yang bersangkutan terhadap peningkatan perekonomian.

Hal ini juga disesuaikan dengan Teori Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti yang disebutkan oleh *United Nation Development Program*

(UNDP, 2004) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah dimana penggunaan wewenang sebaik-baiknya dalam ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara yang juga merupakan instrumen kebijakan negara, dalam mendorong terciptanya kesejahteraan dan kohesivitas sosial di dalam masyarakat. Apabila politik pada suatu negara tersebut tidak stabil dan tata kelola pemerintahan dalam posisi lemah, maka akan mengakibatkan pergerakan yang buruk pada pertumbuhan ekonomi, yang kemudian memicu adanya peningkatan pada laju ketimpangan pendapatan.

Ketidakstabilan politik dan tata kelola pemerintahan yang buruk salah satunya dapat terjadi dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya adalah tindak pidana korupsi, karena menurut (KNKG, 2010) tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor publik ditandai dengan sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi. Keempat jurnal yang dilampirkan pada kajian empiris di dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel korupsi terbukti memiliki efek yang kuat secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa adanya pengurangan atau pemberantasan pada faktor korupsi di seluruh negara, tidak hanya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan di seluruh wilayah di dunia, tetapi juga akan membantu memperkecil ketimpangan pendapatan dan mempersempit distribusi antar wilayah.

Selain faktor korupsi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tentu perlu juga untuk memperhatikan kajian-kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga memasukkan variabel-variabel kontrol lainnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Apabila faktor-faktor atau variabel kontrol yang memungkinkan memiliki dampak yang penting terhadap ketimpangan pendapatan diabaikan maka akan memberikan hasil yang bias tentang hubungan dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor pendukung atau variabel kontrol yang memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan berdasarkan dalam penelitian di dalam jurnal-jurnal acuan yang dipakai oleh penelitian ini, yang kemudian direplikasikan yaitu, variabel pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang juga dipilih berdasarkan keempat jurnal yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, dimana dalam semua jurnal acuan dinyatakan bahwa dengan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan. Menurut Card (1999) pendidikan yang dicapai seseorang bisa menentukan pendapatan yang diterimanya, dimana para pembuat kebijakan berpendapat bahwa sekolah merupakan alat terbaik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Ashenfelter dan Rouse, 2000). Dan sesuai dengan Teori Kuznets (1955), dimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan seperti hipotesis *U-Shaped* terbalik, yaitu dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai mampu dinikmati secara merata oleh seluruh golongan masyarakat, sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Dan terakhir adalah variabel konsumsi pemerintah yang

dipilih berdasarkan penelitian Gyimah-Brempong (2002) dan Gyimah-Brempong & De Gyimah-Brempong (2006), dimana konsumsi pemerintah yang tinggi juga menjadi faktor peningkatan dari ketimpangan pendapatan. Salah satu jurnal mengatakan hal ini dikarenakan tidak maksimalnya pemerintah dalam memanfaatkan anggarannya untuk hal-hal yang dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat (Danawati, Bendesa, & Suyana Utama, 2016).

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan dari kajian teoritis dan studi empiris yang telah dibahas dalam bab ini, maka hipotesis pada penelitian ini menunjukkan:

- Variabel korupsi memiliki hubungan yang positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.
- Variabel pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.
- Variabel konsumsi pemerintah memiliki hubungan yang positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.
- Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap variabel ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015.